

**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH**



**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja PD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2025 sebagai ukuran tercapainya Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 “Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai salah satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDRAP

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep, M.Kes

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19701202 199103 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
4.1 Program dan Kegiatan.....	44
BAB V PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	17
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	26
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.....	32
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	40
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Program dari suatu instansi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya, hal ini merupakan tuntutan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, maka pembangunan dapat dilaksanakan.

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat RENstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

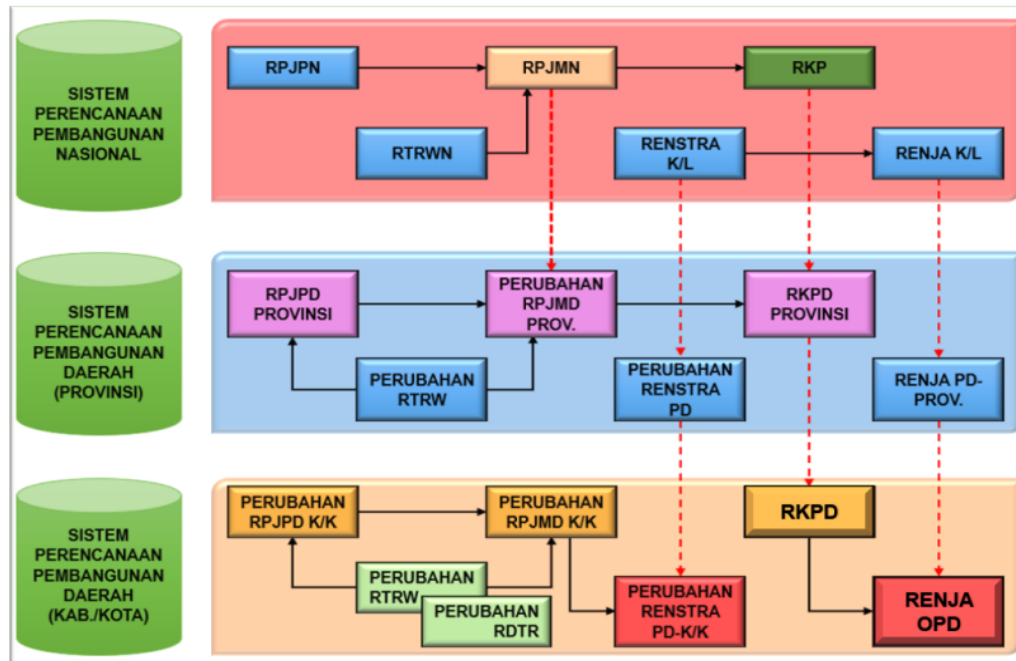
RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar :1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah



Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dearah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-588 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidereng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreg Rappag tahun 2012-2032.(tambahan)
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).
 18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2023, Nomor 30)

1.3 Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja Tahun 2024 ini bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.1. Maksud:

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

- a. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
- b. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2024;
- b. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
- c. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;

- d. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;
- e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.
- f. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu tahun anggaran

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah, proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah, keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 serta pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan Akhir RKPD;

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat Berisikan uraian mengenai:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah yang diambil dari tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2023.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Bab V :Penutup

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 1 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan pencapaian realisasi capaian target dan program/kegiatan Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Penataan Organisasi

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari tiga bagian yaitu Bagian Umum dan Protokol, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah. Kegiatan ini Terealisasi sebesar 100 persen.

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT***Administrasi Tata Pemerintahan***

- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari Empat bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan dengan capaian 100 Persen untuk indikator Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah, selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Program Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal dengan capaian 80 persen untuk Tahun 2022. Untuk Bagian Hukum dengan indikator program Jumlah produk hukum yang dihasilkan dengan capaian 680 dokumen dan untuk Bagian Kerjasama dengan indikator Persentase kerjasama daerah yang dihasilkan dengan capaian untuk Tahun 2022 sebesar 50 Persen.

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari Tiga bagian yaitu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Indikator program Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan dengan capaian 98 persen dan untuk bagian Administrasi Pembangunan dengan indikator Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan juga mencapai 100 persen realisasi dan untuk Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan indikator Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu diperoleh realiasi sebesar 70 persen untuk tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya terkait evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

TABEL T-C.29
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021		Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program / Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program / kegiatan renstra SKPD s/d tahun 2023						
							Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4		5		6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100	100%	2	202	202%				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	100%	2	6	100%
4	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100%	1	3	100%
4	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100%	1	3	100%
4	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100%	1	3	100%
4	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100%	1	3	100%
4	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	2	laporan	2	laporan	2	100%	2	6	100%
4	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	4	laporan	4	laporan	4	100%	4	12	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)						
4	01	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4494	Orang/bulan	1484	Orang/bulan	1498	Orang/bulan	12	1%	12	1508	34%
4	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360	dokumen	360	dokumen	360	dokumen	359	100%	360	1079	300%
4	01	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28	dokumen	12	Kali	12	Kali	12	100%	12	36	129%
4	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	100%	1	3	300%
4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	100%	18	54	300%
4	01	01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
4	01	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	laporan	12	bulan	12	bulan	12	100%	12	36	100%
4	01	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
4	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	225	Paket	75	pasang	0	pasang	72	0%	0	147	65%
4	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	12	Paket	12	100%	12	36	100%
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	12	Paket	12	100%	12	36	100%
4	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	12	Paket	12	100%	12	36	100%
4	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	laporan	12	laporan	12	laporan	12	100%	12	36	100%
4	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36	laporan	0	laporan	12	laporan	12	100%	12	24	67%
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.510	laporan	1173	laporan	1190	laporan	497	42%	1181	2851	81%
4	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

	1				2		3		4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	60	unit	37	unit	0	unit	0	0	0%	0	37	62%						
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	132	unit	0	unit	37	unit	25	68%	24	49	37%							
4	01	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset lainnya yang diadakan	50	unit	0	unit	24	unit	3	13%	24	27	54%							
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	laporan	12	laporan	12	laporan	12	100%	12	36	100%							
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	12	laporan	12	laporan	12	100%	12	36	100%							
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	laporan	12	laporan	12	laporan	12	100%	12	36	100%							
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	laporan	12	laporan	12	laporan	12	100%	12	36	100%							
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111	Unit	10	Unit	37	Unit	18	49%	37	65	59%							
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	4	Unit	21	Unit	19	90%	15	38	181%							
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	162	Unit	26	Unit	50	Unit	98	196%	50	174	107%							
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	Unit	3	Unit	12	Unit	12	100%	0	15	42%							
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	84	Orang/ Bulan	28	Orang/ Bulan	28	Orang/ Bulan	28	100%	28	84	100%							
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	225	Paket	72	Paket	75	Paket	56	75%	75	203	90%							
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0%	0	0	0%							

				1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Orang/ Bulan	24	Orang/ Bulan	24	Orang/ Bulan	24	100%	24	72	100%	
4	01	01	2,12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	12	Paket	12	100%	12	36	100%
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	12	Paket	12	100%	12	36	100%
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	36	Paket	12	Paket	12	Paket	12	100%	12	36	100%
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi												
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	100%	4	12	100%
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	laporan	2	laporan	2	laporan	0	0%	0	2	33%
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100%	1	3	100%
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100%	1	3	100%
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	100%	2	6	100%
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan												
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	72	laporan	24	laporan	24	laporan	24	100%	24	72	100%
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100%	24	224	224%
						Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga	100	Persen	90	Persen	100	Persen	80	80%	24	194	194%
						Jumlah produk hukum yang dihasilkan	2190	dokumen	730	dokumen	730	dokumen	680	93%	730	2140	98%
						Persentase kerjasama daerah yang dihasilkan	100	Persen	80	Persen	100	Persen	50	50%	24	154	154%
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan												
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	100%	3	9	100%

				1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	100%	3	9	100%
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	100%	4	12	100%
4	01	02	2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat													
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	288	dokumen	107	dokumen	96	dokumen	41	43%	96	244	85%
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	33	dokumen	11	dokumen	11	dokumen	11	100%	1	23	70%
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	99	dokumen	33	dokumen	33	dokumen	33	100%	10	76	77%
4	01	02	2,03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum													
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2.190	dokumen	730	dokumen	730	dokumen	730	100%	730	2190	100%
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	78	Kasus	26	Kasus	26	Kasus	24	92%	26	76	97%
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2.190	dokumen	730	dokumen	730	dokumen	730	100%	730	2190	100%
4	01	02	2,04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah													
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60	dokumen	12	dokumen	20	dokumen	10	50%	20	42	70%
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	45	dokumen	8	dokumen	15	dokumen	4	27%	15	27	60%
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	105	laporan	20	laporan	35	laporan	14	40%	35	69	66%

				1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	98	98%	35	233	233%
						Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100%	35	235	235%
						Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	60	Persen	50	Persen	49	Persen	70	143%	35	155	258%
4	01	03	2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian													
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	100%	4	12	100%
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	100%	2	6	100%
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	100%	4	12	100%
4	01	03	2,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan													
4	01	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	36	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	100%	12	36	100%
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36	laporan	12	laporan	12	laporan	12	100%	12	36	100%
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	36	laporan	12	laporan	12	laporan	12	100%	12	36	100%
4	01	03	2,03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	36	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	100%	12	36	100%
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	100%	12	36	100%
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	900	Orang	300	Orang	300	Orang	304	101%	300	904	100%
4	01	03	2,04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam													
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	48	Laporan	0	Laporan	18	Laporan	18	100%	16	34	71%

1				2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	0%	0	1	33%
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	100%	1	3	100%

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep., M.Kes
NIP. 197012021991031005

Berdasarkan Tabel T-C. 29 diatas maka dapat dilihat bahwa hampir semua program dan kegiatan tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program-program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan gambaran pelayanan kinerja secara umum dapat memenuhi indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Semuanya tidak lepas dari peran dan keaktifan seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja antar Dinas, Badan, Kantor dan Unit Pelaksanaan lainnya, adapun Susunan Organisasi Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Hukum, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bagian Kerjasama, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional

d. Asisten Administrasi Umum :

1. Bagian Organisasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Umum dan Protokol :
 - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 3) Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam mencapai kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya maka semua unsur yang terlibat dalam pencapaian tersebut harus berkolaborasi sebagai sebuah sistem yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T.C.30 dibawah ini :

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
1	Kategori Penilaian Nasional hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	-	-	3,0	3,0	3,0	-	3,8	-	-	-	
2	Persentase Pembina Pondok Takfidz yang mendapatkan bantuan kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Persentase mubaligh yang mendapatkan bantuan kesejahteraan	-	-	75	80	85	-	100	100	-	-	
4	Persentase jumlah laporan hasil MoU/Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Persentase capaian sasaran dibidang perekonomian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Persentase laporan hasil pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Level kematangan UKPBJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Persentase OPD yang mampu menerapkan SAKIP sesuai Ketentuan	-	-	70	80	90	-	70	90	-	-	
9	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(15)
10	Persentase pelayanan kegiatan pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Persentase dokumen pertanggungjawaban yang dilaporkan tepat waku	-	-	90	95	100	-	90	100	-	-	
12	Persentase pelaksanaan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	-	-	100	100	100	-	100	100	-	-	
13	Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	50	55	60	-	49	72	-	-	
14	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	60	-	-	-	63	
14	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	
13	Persentase Kebijakan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep., M.Kes
NIP. 197012021991031005

Berdasarkan tabel T-C. 30 di atas, tingkat pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator Kategori Penilaian Nasional hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Tahun 2022 belum terbit penilaian dari Kementerian dalam Negeri. .
- b. Untuk Persentase mubaligh yang mendapatkan bantuan kesejahteraan untuk Tahun 2022 sebesar 100 persen dari target 80 persen, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan.
- c. Untuk Persentase OPD yang mampu menerapkan SAKIP sesuai Ketentuan untuk tahun 2022 dari target 80 persen dan tercapai 90 persen atau mencapai 112 persen realisasi
- d. Untuk Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang dilaporkan tepat waktu ditargetkan 95 persen dan terealisasi sebesar 100 persen pula yang didapatkan dari 10 bagian lingkup Sekretariat daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu semuanya tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban keuangannya.
- e. Untuk Persentase pelaksanaan kebijakan ekonomi yang dilaksanakan untuk Tahun 2022 tercapai sesuai target yaitu 100 persen dan capaian juga 100 persen.
- f. Untuk Persentase Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan Tahun 2022 tercapai sebesar 72 persen dari target 55 persen

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap

permasalahan yang dihadapi, secara umum isu-isu penting yang dihadapi oleh sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni:

1. Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
2. Reformasi Birokrasi, dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah belum optimal;
3. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya. Karena berbagai macam aplikasi yang digunakan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Untuk menumbuh kembangkan kegiatan Pelayanan pada Sekretariat Daerah yang selama ini berjalan, dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan kondisi yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Persoalan dan kondisi yang dihadapi dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yakni lingkungan internal (kekuatan dan Kelemahan) dan lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan).

2.3.1 Faktor Lingkungan Internal :

a. Kekuatan

Kekuatan merupakan situasi lingkungan yang bersifat positif yang memungkinkan Sekretariat Daerah memiliki keuntungan yang strategis dalam mencapai sasaran. Adapun kekuatan yang dimiliki adalah Adanya dukungan penuh dari pimpinan tertinggi organisasi Sekretariat daerah dalam melaksanakan program kerja pada Sekretariat Daerah, disamping itu terjalin komunikasi yang intens dengan Perangkat Daerah yang lain dan stakeholder yang ada.

b. Kelemahan

1. Masih kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana di bidang peralatan perkantoran;

2. Masih kurangnya Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis aparatur yang terkait dengan penguasaan teknologi;
3. Terbatasnya Pendanaan untuk melaksanakan seluruh program kegiatan;

2.3.2 Faktor Lingkungan Eksternal :

Semua organisasi akan saling berinteraksi dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yakni faktor peluang dan faktor tantangan.

a. Peluang

Peluang yang ada disekitarnya dapat dimanfaatkan sebuah organisasi sehingga dapat memudahkan pencapaian program dan sasaran. Adanya komitmen dari pimpinan untuk terus mendukung pelaksanaan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, disamping itu Akses kelancaran Internet sangat membantu dan memudahkan Sekretariat Daerah dalam menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

b. Tantangan

Tantangan yang ditemukan oleh suatu organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja suatu organisasi, Adapun tantangan yang biasanya ditemukan pada Sekretariat Daerah yaitu dengan Tingginya ekspektasi masyarakat atas kualitas pelayanan publik dan Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang menengah (RPJMD). Dalam proses penyusunan RKPD menggunakan prinsip Bottom Up dan Top Down Planning. Prioritas dan realisasi dengan mekanisme musrenbang. Keseluruhan program pembangunan dilaksanakan dan

didistribusikan keseluruh bidang pembangunan guna menjamin sinergitas pembangunan antar daerah, provinsi dan pusat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Secara Umum Reviuw terhadap Rancangan Akhir RKPD Sekretariat Daerah adalah untuk melihat kesesuaian antara Rancangan Akhir dengan hasil analisi kebutuhan oleh Perangkat Daerah, untuk Sekretariat Daerah ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan proses reviuw ini yaitu : Secara umum kegiatan yang diprogramkan pada Sekretariat Daerah sudah masuk dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang hanya terdapat perbedaan nilai pagu indikatif dengan pagu kebutuhan Perangkat Daerah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T.C-31 dibawah ini :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	RENCANA AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PEROGAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	15.804.375.081	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	16.524.375.081	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran</i>	100 Persen	15.000.000	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran</i>	100 Persen	15.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.500.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 dokumen	1.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.450.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	1.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 dokumen	1.800.000	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 dokumen	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.750.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 dokumen	2.000.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.000.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	9.816.087.081	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	9.816.087.081	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1498 Orang/bulan	9.758.587.081	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1498 Orang/bulan	9.758.587.081	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 dokumen	18.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 dokumen	18.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28 dokumen	35.000.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.400.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	2.100.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100 Persen	2.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100 Persen	2.500.000	
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	2.500.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	2.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	30.000.000	
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	10.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	10.000.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Unit	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.357.868.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.357.868.000	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	250.000.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	530.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	530.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	117.868.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	117.868.000	
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	30.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	30.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540 laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540 laporan	350.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	Persen	15.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	Persen	15.000.000
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10.000.000
07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Aset lainnya yang diadakan	1	Unit	5.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	2.111.321.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	2.111.321.000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	10.000.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	1.001.321.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	1.001.321.000
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	100.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.000.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	810.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	Persen	810.000.000
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37	Unit	300.000.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	380.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	380.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52	Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52	Unit	30.000.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	100.000.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	945.599.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	945.599.000
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Orang/ Bulan	210.599.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	Orang/ Bulan	210.599.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	100.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	100.000.000	
03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	35.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang	35.000.000	
04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	600.000.000	
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100 Persen	396.000.000	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100 Persen	936.000.000	
01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	180.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	420.000.000	
02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	120.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	300.000.000	
03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	96.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	216.000.000	
	Penataan Organisasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah	100 Persen	125.000.000	Penataan Organisasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah	100 Persen	125.000.000	
01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen	50.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen	50.000.000	
03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	20.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	20.000.000	
04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	25.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	25.000.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 dokumen	30.000.000	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	0% Persen	180.000.000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	0% Persen	360.000.000	
02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	72 laporan	180.000.000	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	144 laporan	360.000.000	
		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah	100% 100%	183.750.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah	100% 100%	183.750.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	100	Persen	2.575.000.000	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	100	Persen	2.575.000.000
		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	100	Persen	125.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	100	Persen	125.000.000
		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase kerjasama daerah yang dihasilkan	100	Persen	75.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase kerjasama daerah yang dihasilkan	100	Persen	75.000.000
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	100	Persen	183.750.000	Administrasi Tata Pemerintahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	100	Persen	183.750.000
01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	dokumen	25.965.100	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	dokumen	25.965.100
02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	dokumen	58.946.900	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	dokumen	58.946.900
03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	dokumen	98.838.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	dokumen	98.838.000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100	Persen	2.575.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100	Persen	2.575.000.000
01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	96	dokumen	2.500.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	96	dokumen	2.500.000.000
02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11	dokumen	30.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11	dokumen	30.000.000
03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	33	dokumen	45.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	33	dokumen	45.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100	Persen	125.000.000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100	Persen	125.000.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	730 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	730 dokumen	25.000.000	
02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	26 Kasus	25.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	26 Kasus	25.000.000	
03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	730 dokumen	75.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	730 dokumen	75.000.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	100 Persen	75.000.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	100 Persen	75.000.000	
01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	35.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 dokumen	35.000.000	
02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	15 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	15 dokumen	25.000.000	
03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	35 laporan	15.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	35 laporan	15.000.000	
	Program Perekonimian dan Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Laporan Perekonimian yang dilaksanakan	100 Persen	222.344.000	Program Perekonimian dan Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Laporan Perekonimian yang dilaksanakan	100 Persen	222.344.000	
		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100 Persen	75.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	100 Persen	75.000.000	
		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	2,45% 2,45%	125.000.000		Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	2,45% 2,45%	125.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	100 Persen	68.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	100 Persen	68.000.000	
01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	25.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	25.500.000	
02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	25.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	25.000.000	
03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	17.500.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	17.500.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase data pembangunan yang dilaporkan	100 Persen	75.000.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase data pembangunan yang dilaporkan	100 Persen	75.000.000	
01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 dokumen	25.000.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	25.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	25.000.000	
03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	25.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	25.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu	45% Persen	125.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu	45% Persen	125.000.000	
01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	45.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 dokumen	45.000.000	
02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 dokumen	42.500.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 dokumen	42.500.000	
03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	37.500.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	37.500.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	100 Persen	154.344.000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Persentase pelaksanaan pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	100 Persen	154.344.000	
01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	18 dokumen	140.844.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	18 dokumen	140.844.000	
03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen	13.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen	13.500.000	

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep., M.Kes
NIP. 197012021991031005

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pada Bagian kesejahteraan Rakyat karena terkait langsung dengan Pembinaan Keagamaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Namun Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2024 belum ada sebagaimana pada Tabel T-C.32.

NO	URAIAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1		3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa; telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview, maka Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ada 2 (duau) tujuan dan 4 (empat) Sasaran yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian kinerja pelayanan OPD Sekretariat Daerah yaitu :

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2020-2024 :

Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri RI, maka perlu melakukan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah agar tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah berjalan secara berkesinambungan.

Selanjutnya prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 juga diarahkan sinergitas dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Sulawesi untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karakteristik masing-masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Adapun isu strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah:

- a. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan
- c. Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian
- d. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan
- e. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas
- f. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.
- g. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)
- h. Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;

- (2) Untuk mencapai satu tujuan dapat melalui beberapa sasaran;
- (3) Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Adapaun Sasaran Sekretariat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Dokumen Administrasi Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian bidang Perekonomian dan Pembangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengacu pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan. Untuk memberi arah terhadap realisasi program dan kegiatan yang merujuk kepada misi tersebut, maka dapat dideskripsikan misi sebagai frame yang sama dan diketahui dalam tindak operasionalisasi kerja. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang pembiayaan bersumber dari dana DAU APBD Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 3 program dan 20 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Penataan Organisasi

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Administrasi Tata Pemerintahan

- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C. 33 sebagai berikut :

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIT DAERAH
TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

NO	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
4	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	15.804.375.081	DAU	100	Persen	15.952.913.500
4	2	01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran</i>	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	15.000.000	DAU	100	Persen	15.140.000
4	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2	dokumen	3.500.000	DAU	2	dokumen	3.535.000
4	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	dokumen	1.450.000	DAU	1	dokumen	1.464.500
4	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	dokumen	1.800.000	DAU	1	dokumen	1.818.000
4	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	dokumen	1.750.000	DAU	1	dokumen	1.757.500
4	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	dokumen	2.000.000	DAU	1	dokumen	2.020.000
4	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2	laporan	3.000.000	DAU	2	laporan	3.030.000
4	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2	laporan	1.500.000	DAU	2	laporan	1.515.000
4	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	9.816.087.081	DAU	100	Persen	9.914.248.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1498	Orang/bulan	9.758.587.081	DAU		1498	Orang/bulan	9.856.173.000
4	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	360	dokumen	18.000.000	DAU		360	dokumen	18.180.000
4	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	14	dokumen	35.000.000	DAU		14	dokumen	35.350.000
4	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	laporan	2.400.000	DAU		1	laporan	2.424.000
4	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	18	laporan	2.100.000	DAU		18	laporan	2.121.000
4	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	2.500.000	DAU		0	Persen	-
4	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	2.500.000	DAU		0	laporan	-
4	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	30.000.000	DAU		100	Persen	30.000.000
4	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2	Unit	10.000.000	DAU		2	Unit	10.000.000
4	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan h yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	10	Paket	20.000.000	DAU		10	Unit	20.000.000
4	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	1.357.868.000	DAU		100	Persen	1.371.396.000
4	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	80.000.000	DAU		12	Paket	80.800.000
4	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	250.000.000	DAU		12	Paket	252.000.000
4	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	530.000.000	DAU		1	Paket	535.750.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	117.868.000	DAU		12	Paket	119.046.000
4	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	30.000.000	DAU		12	laporan	30.300.000
4	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	270	laporan	350.000.000	DAU		270	laporan	353.500.000
4	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	15.000.000	DAU		100	Persen	15.000.000
4	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2	Unit	10.000.000	DAU		2	Unit	10.000.000
4	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	Unit	5.000.000	DAU		1	Unit	5.000.000
4	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	2.111.321.000	DAU		100	Persen	2.132.434.000
4	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	10.000.000	DAU		12	laporan	10.100.000
4	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	1.001.321.000	DAU		12	laporan	1.011.334.000
4	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	100.000.000	DAU		12	laporan	101.000.000
4	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	1.000.000.000	DAU		12	laporan	1.010.000.000
4	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	810.000.000	DAU		100	Persen	818.100.000
4	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	37	Unit	300.000.000	DAU		37	Unit	303.000.000
4	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	13	Unit	380.000.000	DAU		13	Unit	383.800.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	52	Unit	30.000.000	DAU		52	Unit	30.300.000
4	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	7	Unit	100.000.000	DAU		7	Unit	101.000.000
4	2	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	945.599.000	DAU		100	Persen	952.545.500
4	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	28	Orang/ Bulan	210.599.000	DAU		28	Orang/ Bulan	214.832.000
4	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	40	Paket	100.000.000	DAU		40	Paket	102.010.000
4	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	6	Orang	35.000.000	DAU		6	Orang	35.703.500
4	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	24	Orang/ Bulan	600.000.000	DAU		24	Orang/ Bulan	600.000.000
4	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	396.000.000	DAU		100	Persen	396.000.000
4	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	180.000.000	DAU		12	Paket	180.000.000
4	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	120.000.000	DAU		12	Paket	120.000.000
4	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	Paket	96.000.000	DAU		12	Paket	96.000.000
4	2	13		Penataan Organisasi	Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	125.000.000	DAU		100	Persen	126.250.000
4	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4	dokumen	50.000.000	DAU		4	dokumen	50.500.000
4	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	dokumen	20.000.000	DAU		1	dokumen	20.200.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4	2	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	dokumen	25.000.000	DAU		1	dokumen	25.250.000
4	2	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2	dokumen	30.000.000	DAU		2	dokumen	30.300.000
4	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	0%	Persen	180.000.000	DAU		0%	Persen	181.800.000
4	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	72	laporan	180.000.000	DAU		72	laporan	181.800.000
4				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	183.750.000	DAU		100%	100%	187.176.000
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	90	Persen	2.575.000.000	DAU		100	Persen	2.676.500.000
					Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730	dokumen	125.000.000	DAU		100	Persen	126.250.000
					Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35	dokumen	75.000.000	DAU		100	Persen	75.750.000
4	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	183.750.000	DAU		100	Persen	187.176.000
4	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	3	dokumen	25.965.100	DAU		3	dokumen	26.225.000
4	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	3	dokumen	58.946.900	DAU		3	dokumen	60.131.000
4	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4	dokumen	98.838.000	DAU		4	dokumen	100.820.000
4	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	2.575.000.000	DAU		100	Persen	2.676.500.000
4	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	96	dokumen	2.500.000.000	DAU		96	dokumen	2.600.750.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	11	dokumen	30.000.000	DAU		11	dokumen	30.300.000
4	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	33	dokumen	45.000.000	DAU		33	dokumen	45.450.000
4	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	125.000.000	DAU		100	Persen	126.250.000
4	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730	dokumen	25.000.000	DAU		730	dokumen	25.250.000
4	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	26	Kasus	25.000.000	DAU		26	Kasus	25.250.000
4	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730	dokumen	75.000.000	DAU		730	dokumen	75.750.000
4	2	04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	75.000.000	DAU		100	Persen	75.750.000
4	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	20	dokumen	35.000.000	DAU		20	dokumen	35.350.000
4	2	04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	15	dokumen	25.000.000	DAU		15	dokumen	25.250.000
4	2	04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35	laporan	15.000.000	DAU		35	laporan	15.150.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	222.344.000	DAU		100	Persen	366.334.000
					Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	75.000.000	DAU		100	Persen	75.750.000
					Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2,5	Persen	125.000.000	DAU	2,45%	2,45%	126.250.000	
4	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	68.000.000	DAU		100	Persen	68.175.000
4	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4	Dokumen	25.500.000	DAU		4	Dokumen	25.250.000
4	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2	Laporan	25.000.000	DAU		2	Laporan	25.250.000
4	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4	Dokumen	17.500.000	DAU		4	Dokumen	17.675.000
4	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase data pembangunan yang dilaporkan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	75.000.000	DAU		100	Persen	75.750.000
4	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	dokumen	25.000.000	DAU		12	dokumen	25.250.000
4	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	25.000.000	DAU		12	laporan	25.250.000
4	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	laporan	25.000.000	DAU		12	laporan	25.250.000
4	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	125.000.000	DAU		100	Persen	126.250.000
4	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	dokumen	45.000.000	DAU		12	dokumen	45.450.000
4	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12	dokumen	42.500.000	DAU		12	dokumen	42.925.000

(1)				(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
4	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	300	Orang	37.500.000	DAU		300	Orang	37.875.000
4	2	04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	100	Persen	154.344.000	DAU		100	Persen	298.159.000
4	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	18	dokumen	140.844.000	DAU		18	laporan	284.504.000
4	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1	dokumen	13.500.000	DAU		1	dokumen	13.655.000

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep., M.Kes
NIP. 197012021991031005

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pada OPD untuk membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan mengacu pada rancangan akhir RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini dirumuskan berdasar hasil analisis kebutuhan dan evaluasi renja sebelumnya. Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaa Rencana Kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDRAP

DR. Ns. H. BASRA, S.Kep, M.Kes

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19701202 199103 1 005